

Temuan FGD Yogyakarta dan Solo 2011 Terkait Penguatan Peran Kepemudaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana¹

Bayu Dardias Kurniadi

(bdardias@ugm.ac.id)

A. Pengantar

Bab ini akan menguraikan tentang temuan dari hasil diskusi dalam model FGD yang dilakukan di Yogyakarta dan Solo berkaitan dengan bencana Merapi Oktober-November 2010. Temuan FGD dalam bab ini mengikuti metode yang digunakan dalam keseluruhan rangkaian kegiatan di Yogyakarta dan Solo. Temuan di Yogyakarta yang terdiri dari peserta dari Kab. Sleman dan Kab. Magelang akan menjadi satu bagian mengingat relative meratanya dampak letusan Merapi di dua Kabupaten tersebut. Sementara temuan pada workshop di Solo menunjukkan karakter yang sedikit berbeda, dimana Kab. Klaten mendapatkan dampak yang jauh lebih berat dibandingkan dengan Kab. Boyolali.

Temuan akan diawali dengan masalah berkaitan dengan besarnya erupsi Merapi 2010 yang menimbulkan masalah khusus di empat kabupaten yang diteliti. Dampak dari letusan yang belum pernah diantisipasi sebelumnya terekam dan menjadi masalah tersendiri yang khas.

Selain itu, temuan juga diklasifikasi menjadi dua bagian besar yaitu temuan berkaitan dengan masalah sosial dan temuan berkaitan dengan masalah ekonomi. Temuan dalam masalah sosial terutama berkaitan dengan relasi sosial antar ketiga aktor yaitu pengungsi, relawan dan pemerintah, yang menimbulkan masalah berkaitan dengan manajemen bencana, terutama manajemen pengungsian.

Temuan berkaitan dengan masalah ekonomi akan mengurai tentang kerusakan sistem dan proses produksi dan distribusi ekonomi yang akan diklasifikasi menjadi beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, peternakan, unit dan alat produksi serta infrastruktur penunjang perekonomian.

Temuan dalam setiap kabupten akan dilengkapi dengan potensi pengembangan dan pemulihan pasca bencana dengan perhatian utama kepada potensi yang bisa dilakukan pemuda untuk mempercepat proses tersebut.

B. Karakter Erupsi 2010

¹ Tulisan ini merupakan salah satu bab dalam laporan riset tentang “Penguatan Peran Kepemudaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana” yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kemempora dan Fisipol UGM. FGD Magelang dan Yogyakarta dilakukan 6-7 Januari 2011 dan FGD Solo dan Klaten diselenggarakan tanggal 8-9 Januari 2011.

Salah satu catatan penting berkaitan dengan letusan Merapi 2010 adalah erupsi yang sedemikian besar dalam sejarah pemantauan dan pengelolaan letusan Merapi dalam seratus tahun terakhir. Selain itu, eskalasi letusan Merapi tahun 2010 sangat berbeda dengan letusan yang terjadi pada tahun 2006. Artinya, walaupun semua aktor yang terlibat dalam FGD baik itu pemuda yang menjadi pengungsi dan relawan telah berpengalaman dalam letusan yang terjadi tahun 2006, hal itu terbukti tidak banyak membantu untuk letusan tahun 2010. Letusan Merapi 2010 juga menunjukkan karakter yang sangat berbeda karena ditandai dengan letusan yang *eksplosif* dengan suara yang menggelegar dan muntahan lava pijar ke atas yang terjadi terakhir kali pada letusan tahun 1822. Pada periode 1822 sampai dengan letusan terakhir 2006, Merapi menunjukkan karakter letusan yang *efusif* dengan luberan lava pijar di delapan aliran sungai yang berhulu di puncak Merapi dengan potensi bahaya awan panas (*wedhus gembel*). Selain itu, besarnya material yang dimuntahkan Merapi yang mencapai 125 juta meter kubik menimbulkan persoalan tersendiri, walaupun tetap memiliki potensi dan peluang pengembangan untuk ekonomi penduduk terdampak.

Karakter letusan yang berbeda ini menimbulkan masalah yang cukup serius yang ditemukan dalam FGD di empat kabupaten: Kab. Magelang, Kab. Sleman, Kab. Klaten dan Kab. Boyolali. Beberapa masalah terhadap besarnya erupsi tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Tetap (Protap) Tidak Dapat Menjadi Acuan

Protap yang diberlakukan untuk letusan Merapi tahun 2006 dan sebelumnya terbukti tidak dapat digunakan untuk mengantisipasi letusan yang sedemikian massif. Sebagai akibatnya, terjadi kekacauan dalam pelaksanaan mekanisme dan manajemen pengungsian. Pada prosedur yang ada, apabila terjadi letusan Merapi, beberapa desa dalam radius sekian kilometer dinyatakan aman dan menjadi lokasi pengungsian, baik itu Tempat Pengungsian Sementara (TPS) maupun Tempat Pengungsian Akhir (TPA) untuk manusia dan beberapa tempat pengungsian untuk hewan ternak. Karena dampak erupsi yang besar, kategori pengungsian tersebut tidak dapat terus ditaati. Baik TPS maupun TPA berada di zona rawan.

2. Perpindahan Lokasi Pengungsian

Tidak adanya Protap yang sesuai dengan kondisi Merapi saat ini mengakibatkan perpindahan lokasi pengungsian hingga beberapa kali. Para pengungsi stress dan jenuh karena harus berpindah dari satu lokasi pengungsian ke lokasi pengungsian berikutnya yang tempatnya semakin lama semakin jauh (turun) dari tempat tinggal asalnya. Pembuatan TPA di beberapa desa di Sleman dan Magelang terpaksa tidak dapat dihuni mengingat eskalasi letusan yang semakin besar. Penentuan TPA didasarkan pada pangalaman daerah aman untuk letusan Merapi dalam beberapa tahun terakhir tidak terbukti efektif untuk letusan 2010. Beberapa TPA yang dibangun dengan cepat dan telah memiliki fasilitas pengungsian yang lebih baik dari TPS, tidak dapat dihuni karena masuk dalam wilayah rawan terdampak letusan eksplosif Merapi yang meluas hingga radius 20 km.

Pengungsi terpaksa mengungsi dari rumah ke TPS, dari TPS ke TPA dan dari TPA yang seharusnya menjadi lokasi pengungsian terakhir ke lokasi pengungsian baru yang letaknya lebih dari 20 km dari tempat tinggalnya. Lokasi akhir ini telah masuk ke wilayah kota dengan karakter urban misalnya di stadion Maguwoharjo, Sleman dan GOR New Armada di Magelang.

Masalah yang menyertai perpindahan pengungsi ini juga sangat beragam. Pengungsi yang merasa sudah nyaman berada di tempat pengungsian terdahulu (karena mungkin datang lebih awal sehingga dapat memilih bagian strategis dari pengungsian), harus beradaptasi dengan lokasi pengungsian baru yang dihuni lebih banyak orang. Selain itu, sebagian besar pengungsi juga harus beradaptasi dengan karakter urban yang berbeda dengan kondisi di desanya. Selain menjadi lebih jauh dari rumah sehingga menimbulkan masalah psikologis tersendiri, beberapa pengungsi merasa perpindahan pengungsian ini sangat mengganggu karena seringkali mereka yang tinggal di satu dusun, harus terpisah dalam proses perpindahan pengungsian tersebut sehingga mereka mengungsi dengan orang yang tidak mereka kenal yang menimbulkan potensi masalah lanjutan berupa kriminalitas dan psikologis.

3. Kurangnya Kesadaran Warga untuk Mengungsi

Warga yang berada di daerah rawan bencana merasa masih aman berada di tempat tinggalnya meskipun sebenarnya secara riil tidak. Mitos masyarakat bahwa desa tertentu akan aman dari letusan Merapi membuat rendahnya partisipasi pengungsi. Beberapa aparat dan relawan harus memaksa warga untuk mengungsi. Mitos ini mereda ketika letusan pada tanggal 26 Oktober 2010 yang menewaskan Mbah Maridjan sebagai juru kunci Merapi dan hilang ketika Merapi meletus dasyat pada 4 November 2010. Kasus di seluruh kabupaten menunjukkan bahwa terdapat lonjakan dasyat pengungsi pasca 4 November yang menyulitkan proses evakuasi. Warga yang tadinya menolak mengungsi menjadi orang yang meminta pertama kali untuk diungsikan. Apabila sebelum 4 November masyarakat merasa aman walaupun berada di daerah tidak aman, pasca 4 November, masyarakat yang sebenarnya berada di lokasi aman merasa dirinya tidak aman.

Pengungsi juga tidak memiliki kesadaran terhadap bencana. Ketika harus mengungsi, para pengungsi tidak mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya pengungsi yang membawa dua bahan kebutuhan pokok mengungsi yaitu tikar dan selimut. Dua barang ini selalu ada di rumah pengungsi tetapi tidak dibawa walaupun memiliki waktu untuk mempersiapkannya. Padahal lokasi pengungsian yang serba terbatas belum tentu memiliki fasilitas yang cukup.

4. Ancaman Lahar Dingin

Salah satu hal penting yang menjadi catatan erupsi Merapi 2010 adalah, bahkan pada saat penulisan laporan ini, bencana lahar dingin sebagai ekses letusan Merapi masih terjadi dengan kondisi terparah di Kabupaten Magelang khususnya dalam radius aliran Sungai Putih. Lahar dingin Merapi tersebut telah memutuskan jalur nasional Semarang-Yogyakarta sebanyak sembilan kali dan telah membuat ratusan kepala

kaluarga masih mengungsi. Lahar dingin di Magelang tersebut juga telah menghancurkan pasar desa Jumoyo dan membuat aktifitas ekonomi terganggu.

Artinya beberapa daerah di Magelang saat ini masuk dalam kategori tanggap darurat. Hal ini harus menjadi perhatian serius agar dampak negatifnya bisa dinimalisir.

C. Temuan FGD Yogyakarta

Berikut temuan FGD Yogyakarta yang dibagi berdasarkan masalah ekonomi, masalah sosial dan potensi pemuda dalam membantu proses recovery dan normalisasi pasca bencana.

1. Masalah Ekonomi

a. Rusaknya Infrastruktur Produksi, Distribusi dan Pertukaran Ekonomi

Dampak paling serius terhadap ekonomi adalah rusaknya infrastruktur produksi, distribusi dan pertukaran ekonomi. Rusaknya infrastruktur produksi dapat dibagi menjadi beberapa sektor lainnya seperti pertanian dan peternakan yang akan menjadi topik bahasan selanjutnya. Dampak terhadap distribusi dan pertukaran ekonomi mengganggu bagi tetap berlangsungnya mekanisme ekonomi.

Masyarakat kehilangan tempat untuk melakukan aktifitas transaksi ekonomi karena fasilitas untuk itu rusak atau tidak berfungsi. Pasar-pasar di Sleman dan Magelang lumpuh akibat tidak adanya orang yang berjualan dan membeli. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya komoditas ekonomi yang diperdagangkan karena musnah oleh letusan, tidak adanya aktor ekonomi karena baik penjual maupun pembeli menjadi pengungsi, dan ancaman Merapi berupa letusan dan abu vulkanik yang mengganggu. Beberapa pasar juga hancur oleh awan panas sehingga tidak berfungsi.

Selain ketiadaan komoditas, aktor dan infrastruktur, pasar mengalami kelumpuhan akibat tidak adanya fasilitas penunjang seperti listrik dan air bersih. Sumber listrik mati dan sumber air bersih di hulu sungai rusak. Di beberapa daerah di Sleman juga kekurangan air bersih akibat sumber air tertimbun material dan saluran air yang mengalir sumber ekonomi rusak.

b. Rusaknya Basis Produksi Pertanian

Basis produksi pertanian terdiri dari basis produksi sawah dan perkebunan, terutama sayuran yang menjadi andalan bagi desa-desa di Kab. Magelang di sekitar lereng Merapi. Dua basis pertanian ini mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi di beberapa kecamatan di Sleman dan Yogyakarta.

Pada produksi padi di persawahan, kerusakan umumnya diakibatkan oleh tertutupnya areal persawahan dengan abu vulkanik hingga beberapa puluh centimeter. Selain itu, sawah mengalami kerusakan akibat terganggunya distribusi saluran irigasi yang mensuplay air ke sawah. Terganggunya pasokan air di daerah hulu, berdampak pada areal persawahan yang berjarak cukup jauh dari Merapi.

Pada produksi perkebunan, selain karena dampak abu vulkanik, ketiadaan orang yang merawat dan memetik hasil perkebunan serta ketiadaan pasar untuk menjual produk perkebunan menjadi masalah tersendiri. Pada beberapa jenis tanaman, terdapat dampak tidak secara langsung mematikan tanaman tersebut di beberapa kecamatan. Beberapa tanaman gagal panen karena telah melewati masa panen dan tidak dipetik. Pengungsi yang sempat kembali ke kebunnya melakukan pemanenan dan menjadi bahan konsumsi di lokasi pengungsian. Beberapa pengungsi yang membawa hasil kebun ke lokasi pengungsian untuk dikonsumsi bersama ditemukan merata di hampir seluruh tempat.

Namun demikian, potensi pemulihan lahan pertanian diperkirakan akan cepat karena tingginya curah hujan yang merata di semua tempat. Abu vulkanik yang sempat memutuskan jalur darat Semarang-Yogyakarta dan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan, hilang dalam beberapa minggu karena tingginya curah hujan. Tingginya curah hujan ini juga membantu proses recovery pertanian terutama sawah yang membutuhkan pasokan air yang cukup banyak. Artinya kegagalan panen diperkirakan hanya akan terjadi dalam satu periode masa tanam.

c. Rusaknya Basis Produksi Peternakan

Masyarakat di lereng Merapi, baik di Sleman maupun Magelang mengandalkan peternakan sapi perah sebagai salah satu sumber penting ekonomi keluarga. Rusaknya produksi dan distribusi susu petani yang dikelola dalam koperasi memberikan dampak berkelanjutan bagi ekonomi warga terdampak.

Warga yang sapinya mati akibat letusan karena tidak sempat diungsikan, menunggu selama beberapa bulan untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Mereka yang sapinya masih hidup, banyak yang terpaksa menjual murah karena hilangnya sumber pendapatan ditengah janji pemerintah untuk membeli sapi kalah oleh tawaran tengkulak yang membawa uang tunai di barak-barak pengungsian.

Selain itu, ekonomi yang berbasis kepada peternakan sapi perah terganggu karena koperasi yang selama ini menerima kiriman susu dari peternak tidak beroperasi. Karakter susu yang harus segera melalui beberapa proses sterilisasi dan ultraviolet agar aman dikonsumsi membuat banyak susu yang akhirnya dibuang percuma. Beberapa pengungsi yang membawa sapinya dekat dengan

lokasi pengungsian, tetap memerah sapinya dan hasil susunya digunakan untuk konsumsi bersama di pengungsian.

d. Perebutan Sumber Ekonomi Baru

Dampak lain dari letusan Merapi adalah munculnya sumber ekonomi baru berupa potensi wisata *lava tour* dan melimpahnya material yang dikeluarkan saat letusan. Apabila tidak ditangani dan dikelola secara serius, dampak sumber ekonomi baru yang seharusnya membawa berkah, justru berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat disamping relasi sosial.

Pada kasus *lava tour* di Sleman misalnya, tidak ada transparansi dari pungutan yang dilakukan terhadap “turis” dengan tarif mobil 10.000 rupiah dan motor 5.000 rupiah belum termasuk parkir yang jumlahnya bisa sama dengan ongkos masuk. Biaya ini jauh lebih besar dari biaya masuk ke lokasi wisata Kaliurang yang cukup terkenal yang dikelola Pemkab Sleman.

Berbeda dengan *lava tour*, melimpahnya pasir Merapi juga tidak secara langsung berdampak kepada masyarakat yang terdampak paling serius. Pasir Merapi ditambang di sungai-sungai yang dekat dengan jalan raya yang letaknya lebih dari 10 km dari puncak Merapi. Masyarakat yang menikmati pasir adalah mereka yang tinggal tidak terlalu dekat dengan puncak, tetapi dekat dengan aliran sungai yang berada di dekat jembatan. Masyarakat paling terdampak harus “turun” dulu untuk dapat memanfaatkan pasir.

Selain itu, pasir juga memiliki potensi masalah berkaitan dengan tata kelola yang tidak jelas. Hal ini terlihat dari melonjaknya harga pasir di tingkat konsumen pada saat pasokannya berada pada posisi puncak. Pembeli pasir harus membayar banyak sumbangan sehingga meningkatkan biaya yang akhirnya harus ditanggung konsumen.

2. Masalah Sosial

a. Masalah di Pengungsian

Masalah di pengungsian sangat kompleks dan terdiri dari beberapa lapis persoalan. Manajemen pengungsian menjadi keluhan utama. Tingginya partisipasi masyarakat dan relawan untuk membantu proses evakuasi dalam masa tanggap darurat seringkali tidak disertai dengan kemampuan managerial untuk membantu manajemen pengungsi. Manajemen pengungsi juga tidak memiliki alur proses yang jelas sehingga terjadi tumpang tindih dan miskoordinasi. Data yang dimiliki posko pengungsian sering tidak sama dengan data yang dimiliki instansi pemerintah. Akibatnya, manajemen logistik dan bantuan seringkali bermasalah. Ketidakakuratan data ini juga terlihat dari “fasilitas” pengungsian yang beragam di lokasi. Ada pengungsian yang memiliki fasilitas lengkap dengan dukungan logistic yang melimpah dan ada yang kekurangan.

Pengungsian seringkali tidak disiapkan untuk menunjang kehidupan pengungsi untuk jangka waktu yang cukup lama. Tidak adanya fasilitas dasar seperti MCK yang memadai menjadi keluhan utama pengungsi. Pengungsi juga seringkali dihadapkan pada masalah tambahan ketika hujan karena pengungsian tidak didesain untuk bisa mengantisipasi kondisi cuaca tersebut.

Pada level yang berbeda, rendahnya daya adaptasi pengungsi terhadap lokasi dan kondisi yang baru menambah pelik persoalan di pengungsian. Beberapa pengungsi dipandang sangat manja dan hanya bergantung kepada bantuan dan uluran tangan relawan. Pada titik lainnya, muncul kecemburuan karena bantuan yang diterima di satu barak pengungsian tidak seragam dan bergantung kepada pasokan bantuan dari luar yang jumlahnya sering tidak mencukupi untuk seluruh pengungsi. Pengungsi juga kesulitan untuk beradaptasi dengan peralatan modern sederhana seperti susu instan bubuk dan pembalut bayi (pampers). Selain itu, beberapa pengungsi juga dilaporkan rakus dan berusaha memiliki sebanyak mungkin pasokan pengungsi

Namun demikian, hampir semua peserta FGD sepakat bahwa masalah di pengungsian sebagian besar selesai ketika fase pengungsian berakhir. Masalah yang timbul sering tereskalasi karena kondisi kejiwaan yang tidak normal.

b. Relasi Antar Aktor

Relasi antar aktor terdiri dari relasi antara pengungsi, relawan dan pemerintah. Hubungan antara sesama pengungsi dan masalah yang ditimbulkan karena relasi tersebut umumnya selesai setelah masa pengungsian selesai. Begitu juga yang terjadi antara pengungsi dengan relawan.

Berdasarkan FGD ditemukan potensi masalah berkelanjutan antara pengungsi dengan pemerintah karena tingginya tingkat ketidakpercayaan. Beberapa temuan menunjukkan bahwa terdapat pola kerja yang berbeda antara relawan dengan pemerintah. Relawan lebih mengandalkan kecepatan pelayanan sedangkan pemerintah lebih mengedepankan ketepatan prosedur.

Pengungsi lebih memilih diungsikan oleh relawan daripada oleh pemerintah. Beberapa pengungsi menyebutkan fasilitasi evakuasi yang dilakukan pemerintah seringkali hanya menomorsatukan perginya pengungsi dari lokasi rawan tanpa memperhitungkan kesiapan lokasi penerimaan pengungsi. Akibatnya banyak pengungsi yang terlantar untuk waktu yang tidak sebentar.

Selain itu, janji pemerintah untuk membeli sapi dan mengganti sapi mati terlalu lama terealisasi dan kalah oleh pedagang yang mendatangi pengungsi satu per satu dengan uang tunai di tangan. Munculnya potensi *distrust* terhadap pemerintah ini harus disikapi dengan serius.

c. Penanganan Warga Berkebutuhan Khusus

Penanganan warga berkebutuhan khusus seperti perempuan, manula dan anak tidak pernah menjadi prioritas sejak awal proses evakuasi. Fasilitas yang berada di lokasi pengungsian tidak memperhatikan kebutuhan khusus perempuan yang dibuktikan dengan tidak adanya fasilitas khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan MCK yang seadanya. Pengungsian hanya terdiri dari ruangan dengan semua orang berkumpul menjadi satu. Pada proses persaingan seperti ini, kaum lelaki lebih mendominasi.

Beberapa pengungsi juga mengeluhkan ketiadaan aturan baku di pengungsian sehingga mudah ditemukan pengungsi yang merokok di dalam ruangan pengungsian yang penuh bayi dan anak-anak. Kelemahan lainnya dapat dilihat dari fasilitas yang minim untuk anak dan manula.

3. Potensi Pemuda

a. Aktor Pemulihan Ekonomi dan Sosial

Pemuda dapat menjadi aktor penting bagi pemulihan ekonomi dan sosial lokasi terdampak. Pemuda dinilai gesit dan memiliki sumber daya dan kesempatan untuk menjadi penggerak proses *recovery*. Dalam proses yang terjadi selama erupsi dan penanganan pengungsi, pemuda menunjukkan kiprah yang serius karena menjadi tulang punggung keseluruhan proses tersebut.

Pemulihan kondisi ekonomi dan sosial harus melibatkan pemuda karena merekalah yang sejak awal terlibat dan mengetahui secara detail permasalahan yang dihadapi masyarakat.

b. Kekuatan Jaringan

Pemuda juga dinilai memiliki keunggulan dengan memanfaatkan jaringan yang selama ini telah terbentuk. Sebagian besar pemuda, baik pengungsi maupun relawan, tergabung dalam organisasi dengan ketertarikan yang berbeda-beda. Pemuda tergabung dalam organisasi kewilayahan seperti karang taruna, organisasi dengan cakupan nasional misalnya KNPI, dan organisasi keagamaan dan organisasi dengan minat khusus.

Kemampuan pemuda dalam memanfaatkan jaringan organisasi yang telah terbentuk ini akan sangat penting untuk mempercepat proses *recovery*.

c. Pemanfaatan Sumber Ekonomi Baru

Pemuda juga menjadi aktor penting dalam proses pemanfaatan sumber ekonomi baru misalnya *lava tour* dan manajemen pengelolaan pasir.

D. Temuan FGD Solo

Berikut temuan FGD Surakarta yang dibagi berdasarkan masalah ekonomi, masalah sosial dan potensi pemuda dalam membantu proses *recovery* dan normalisasi pasca bencana. Secara umum, dampak yang dialami Klaten dan Boyolali tidak seperti dampak yang dialami oleh Magelang dan Sleman. Klaten mengalami lebih banyak daerah terdampak dibandingkan dengan Boyolali. Kawasan terdampak di Boyolali hanya berada di beberapa desa di Kecamatan Selo yang berbatasan langsung dengan Magelang.

4. Masalah Ekonomi

a. Rusaknya Infrastruktur Produksi, Distribusi dan Pertukaran Ekonomi

Mirip dengan dampak yang terjadi di Magelang dan Sleman, kasus Klaten dan Kec. Selo di Boyolali menunjukkan rusaknya infrastruktur produksi, distribusi dan pertukaran ekonomi dengan skala yang lebih terbatas. Hanya saja, kondisi ini cepat tertangani karena beberapa pasar-pasar lainnya tetap beroperasi seperti biasa.

b. Rusaknya Basis Produksi Pertanian

Basis produksi pertanian di daerah pegunungan terdiri dari basis produksi sawah dan perkebunan, terutama sayuran yang menjadi andalan bagi ekonomi desa-desa. Sayuran cocok untuk ditanam pada ketinggian tertentu dan dapat tumbuh subur. Sawah dan kebun mengalami kerusakan dengan skala bervariasi, walaupun kerusakan di Klaten lebih parah.

c. Rusaknya Basis Produksi Peternakan

Dampak rusaknya basis produksi peternakan sangat dirasakan warga di Klaten dan Boyolali. Boyolali menspesialisasikan diri pada produksi susu sapi merasakan dampak yang cukup serius. Patung-patung sapi yang megah terbangun di seluruh kota seolah sendu menghadapi letusan Merapi.

Peternak tidak mampu menyetorkan susu sapi ke koperasi karena mutunya yang menurun dan tidak memenuhi kriteria minimal penyetoran. Salah satu akibat rendahnya mutu sapi ini adalah rendahnya kualitas pakan yang terkontaminasi abu Merapi dan sapi yang stress karena harus bernafas dengan terkontaminasi abu, selain adanya bakteri yang jumlahnya lebih banyak dari yang dapat ditoleransi. Sampai saat ini, belum ada masker anti abu vulkanik yang didesain khusus untuk sapi.

d. Perebutan Sumber Ekonomi Baru

Perebutan sumber ekonomi baru pasir juga terjadi di Klaten dan Boyolali. Bedanya, penambangan pasir di Boyolali tetap dilakukan di lereng Merapi dan tidak dilakukan di bagian hilir seperti di Sleman. Beberapa masalah yang dicatat antara lain adanya penambang dari luar daerah yang menambang pasir di desa yang penduduknya masih mengungsi. Hal ini menimbulkan persaingan dalam perebutan pasir.

Namun demikian, salah satu temuan diskusi menunjukkan adanya peningkatan sumber ekonomi baru bagi warga di sekitar lereng Merapi. Beberapa peserta diskusi menuturkan bahwa pendapatan penduduk dapat mencapai 100.000 rupiah per hari. Banyak warga yang kemudian berbondong-bondong memburu rejeki dari pasir yang menggiurkan tersebut dan meninggalkan pekerjaan utama mereka.

5. Masalah Sosial

Secara umum, masalah sosial yang dihadapi dari hasil FGD di Surakarta mirip dengan di Yogyakarta. Beberapa penajaman terhadap masalah adalah sebagai berikut:

Di beberapa daerah di Klaten, pengungsi yang mengungsi di rumah-rumah penduduk menimbulkan dampak ekonomi baru yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam proses evakuasi terdapat dua istilah untuk pengungsi dan lokasi pengungsian yaitu “pengungsi resmi” dan “pengungsi tidak resmi”. Pengungsi resmi adalah pengungsi yang mengungsi di barak/tempat pengungsian yang disediakan pemerintah, sedangkan pengungsi tidak resmi adalah mereka yang mengungsi di rumah warga dan sering tidak tercatat sebagai pengungsi. Penanganan terhadap pengungsi tidak resmi ini perlu mendapatkan catatan khusus.

Ide tentang adanya “bilik mesra” bagi pengungsi terbukti hanya menghabiskan anggaran. Pengungsi yang akan memanfaatkan bilik mesra harus mendaftarkan diri kepada petugas dan kemudian bilik itu dijaga ketika proses berlangsung agar tidak ada pengungsi lain yang masuk ke dalam. Tidak ada satupun pengungsi yang memanfaatkan bilik mesra tersebut karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa proses hubungan seksual suami-istri adalah peristiwa sakral yang hanya melibatkan dua orang saja dan dilakukan dengan tertutup. Bilik mesra terbukti memunculkan masalah baru daripada menyelesaikannya.

Pada beberapa kasus di Klaten juga menunjukkan tindakan kriminalitas yang dilakukan dalam proses pengungsian. Selain kasus pencurian yang marak, terdapat juga kasus penjualan sumbangan pengungsi yang dilakukan tidak hanya oleh pengungsi, tetapi juga pengelola pengungsian.

Para pengungsi yang secara administrative berada di Kabupaten Boyolali mengungsi di Kabupaten Magelang karena kedekatan jarak. Hal ini menimbulkan masalah administratif karena pengelolaan pengungsi masih berdasarkan pada kebijakan masing-masing kabupaten dan belum mewartai potensi masalah yang berlangsung di daerah perbatasan seperti di Kecamatan Selo.

6. Potensi Pemuda

Potensi pemuda besar untuk menjadi motor pemulihan ekonomi. Di beberapa desa di Boyolali telah terbentuk pemuda desa yang berpotensi untuk mengembangkan pariwisata yang sempat terganggu. Pemanfaatan jaringan pemuda desa ini akan efektif untuk mempercepat proses pemulihan di kecamatan Selo.

Pemuda di Klaten juga menunjukkan peran yang signifikan dalam keseluruhan proses tanggap darurat. Mereka terbukti berada di lini depan ketika bencana terjadi dan bereaksi cepat untuk penanganan pengungsi. Mereka melakukan Aksi Cepat Tanggap dan tidak seperti banyak pihak lain yang melakukan Aksi Cepat Tancap agar umbul-umbul perusahaan dan partai politiknya disiarkan media.

E. Kesimpulan

Walaupun pada titik tertentu memiliki perbedaan yang cukup serius, masalah yang dihadapi dari empat kabupaten yang diteliti dapat dipilah menjadi dua, yaitu terdampak serius meliputi Magelang, Sleman dan sebagian Klaten, dan daerah tidak terdampak serius yaitu Boyolali. Perbedaan ini memiliki implikasi serius terhadap mekanisme pengelolaan pemuda di empat daerah tersebut.

Karena perbedaan tingkat kerusakan tersebut, perlu dicari upaya penyelesaian yang spesifik dengan karakter dan masalah yang dihadapi masing-masing Kabupaten sehingga tepat sasaran yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.